

PERAN ORANG JAWA DAN CINA DALAM KERUANGAN KOTA MEDAN

(Sebuah Studi Antropologi dalam Pengembangan dan Penataan Kota Medan)

Suyadi

Staf Teknis Balai Bahasa Medan

ABSTRAK:

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik sampling. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran orang Jawa dan Cina dalam keruangan kota Medan.

Peran atau partisipasi warga dalam *governance* adalah keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik untuk pembangunan daerahnya.

Peran warga yang tecermin dalam sistem pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan lokal pada masyarakat Jawa dan Cina masih mempertimbangkan nilai-nilai adat, seperti melakukan prinsip-prinsip konservasi, manajemen, dan eksploitasi sumber daya alam, ekonomi, dan sosial. Hal ini tampak jelas pada perilaku masyarakat yang memiliki rasa hormat begitu tinggi terhadap struktur ruang publik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupannya.

Kebudayaan Jawa dan Cina merupakan nilai-nilai kebudayaan nenek moyang orang Jawa dan Cina pada zamannya masing-masing. Kebudayaan itu sendiri sebenarnya tidak semua statis tetapi berubah menurut kondisi zaman yang memberikan tantangan yang berbeda pula, namun ada nilai-nilai luhur yang perlu dilestarikan dan tentu ada yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kondisi ini adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari atau dibendung, bahwa dari waktu ke waktu, lamban atau cepat, kebudayaan satu suku bangsa akan mengalami perubahan, terutama dalam kaitannya dengan ruang-ruang publik.

KATA KUNCI: keruangan kota, antropologi sosial

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kota-kota di Indonesia, termasuk Medan, dibentuk berdasarkan kerjasama, toleransi, dan kesepakatan¹. Konflik justru muncul

manakala pemukiman kumuh atau sektor informal kota tumbuh secara gradual kemudian digusur dan digantikan pemukiman yang terencana. Di balik keburukan proses pertumbuhan gradual berdasarkan kerja sama, toleransi, dan kesepakatan dari kota-kota semacam Medan, proses pertumbuhan itu – dengan budaya feodalisme yang sejak lama berkembang – akan sangat mungkin dimanipulasi oleh kalangan elite atau pemerintahan. Sehingga, wajah keruangan kota serta strukturnya merupakan hasil dari proses kerja sama, toleransi, dan kesepakatan yang diturunkan dari atas (*top-down*), dan dengan demikian mengeliminasi partisipasi serta

¹ Pada tahap-tahap awal pertumbuhan kota, setidaknya kesepakatan mengenai keruangan dan struktur kota, dapat mencerminkan kepentingan berbagai pihak dan mengurangi konflik vertikal (pemerintah dengan masyarakat) maupun konflik horisontal (antarmasyarakat) menjadi sekecil mungkin. Berkaitan aspek ekonomi, sosial, dan politik, kajian Bank Dunia mencatat munculnya konflik-konflik yang menimbulkan kekerasan akibat perbedaan kepentingan ketiga aspek tadi (kerja sama, toleransi, kesepakatan), dengan ciri yang agak berbeda-beda pada masing-masing kota.

kepentingan rakyat.

Pelly (*ibid*) dalam penelitiannya mengenai masyarakat Minangkabau dan Mandailing di Kota Medan membuat suatu peta pemukiman etnik Medan pada tahun 1909 sebagai pusat kota. Tidak hanya pemukiman asli dan pendatang dari dalam negeri, tetapi juga pemukiman orang-orang pendatang dari luar negeri (Eropa, Cina, India, dan Arab). Mengutip berbagai literatur, Pelly memaparkan segregasi lahan pemukiman etnik di Medan. Di antaranya, dalam wilayah orang Eropa terletak berbagai kantor pemerintah, kantor perkebunan, dan perumahan bangsa Eropa. Pemukiman India berbatasan dengan pemukiman orang Eropa. Sementara dekat pasar lama, terdapat toko-toko Cina dan Arab serta perumahan mereka. Sedangkan kaum pribumi Indonesia, misalnya Melayu, Mandailing, dan Minangkabau, berada di sekitar pinggiran kota.

Pemisahan lokasi-lokasi etnik itu, menurut Pelly, diperkuat oleh peraturan-peraturan dan oleh pembagian-pembagian kehidupan politis dan ekonomik. Sehingga, orang yang tinggal di dalam kota dianggap "rakyat gubernemen" dan orang yang tinggal di luar kota adalah "rakyat Sultan" (dianggap berada di bawah kekuasaan keadilan Sultan dengan segala hukum kerajaan yang tertulis.² Hanya saja, semua kuli kontrak (Cina, Jawa, Sunda, dan Banjar) di perkebunan-perkebunan dan mereka yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan Belanda dan Eropa, walau

tinggal di wilayah Sultan secara administratif bukanlah rakyat Sultan (Bool, 1904 : 35 dan Sinar, 1976 : 9 via Pelly, *ibid*).

Menjelang 1930, Medan berkembang menjadi suatu kota modern baru. Sebuah elite yang berakar pada perkebunan-perkebunan telah menggantikan elite-elite kebangsawanan pedesaan prakolonial yang "feodalistik" (Langenberg, 1982 : 4, *ibid*). Dari sini, kota Medan terlapis dalam tiga kelompok sosial yang berbeda: 1) para tuan kebun, pengusaha, dan pegawai pemerintah berbangsa Belanda dan bangsa Eropa lain; 2) bangsawan-bangsawan Melayu, pengusaha Cina, dan orang-orang profesional Indonesia berpendidikan Barat (terutama pegawai negeri senior); dan 3) orang-orang Melayu, Cina, dan Indonesia *kebanyakan* serta para perantau dari berbagai kelompok etnik, termasuk Jawa, Mandailing, dan Minang (*ibid*).

Penjajah Belanda mempertahankan pemisahan sosial ini secara resmi dengan mengeluarkan peraturan diskriminatif; memisahkan wilayah-wilayah pemukiman tertentu dan memberikan perlakuan khusus, misalnya penjagaan keamanan khusus dan akses yang diskriminatif terhadap fasilitas-fasilitas rekreasi orang-orang Eropa dan Cina kaya. Pemukiman Cina, Arab, dan India di pusat kota diberi pengamanan oleh polisi Belanda. Selain itu, komunitas Cina dikepalai seorang "mayor" Cina dan komunitas-komunitas Arab serta India dikepalai seorang "kapten" India dan Arab. "Mayor" dan "kapten" ini dianggap sebagai wakil-wakil politis masing-masing komunitas (*op.cit*).

Dari ilustrasi di atas, segregasi penguasaan lahan menjadi sangat penting untuk menentukan kehidupan kota. Pemisahan lokasi peninggalan Belanda yang sepertinya masih "terpelihara" hingga pemerintahan sekarang, berakibat adanya penumpukan suatu komunitas di inti kota

² Kasus-kasus perdata dan pidana rakyat Sultan, misalnya, diadili oleh pengadilan Sultan (*Kerapatan*), sementara rakyat *Gubernemen* diadili oleh pengadilan pemerintah (*Landraad*). Orang-orang yang tinggal dalam kota harus membayar pajak-pajak kepada kotapraja, sedang rakyat yang tinggal di wilayah Sultan selain membayar pajak kepada Sultan, dengan tambahan harus melakukan kerja wajib (Kotapraja, 1959 : 74 via Pelly, 1994 : 78).

dan peminggiran wilayah komunitas lain. Hal ini dapat terlihat dari lokasi pemukiman kaum migran yang berasal dari etnis Jawa dan Cina pada beberapa kecamatan di Medan. Meskipun kedua etnis ini pada umumnya merupakan warga pendatang, namun memiliki tipikal yang berbeda. Orang Jawa meski mendominasi persebaran penduduk hampir di semua kecamatan, tetap menempati kelas rendahan (menengah ke bawah) dibandingkan masyarakat turunan Tionghoa yang menempati kelas menengah ke atas.

Menurut pengamatan penulis, sebagian besar masyarakat Jawa tinggal di kawasan padat dan kumuh di pinggiran kota serta banyak memilih usaha sebagai buruh, pertukangan, pedagang kecil, pembantu rumah tangga, dan pegawai rendahan. Ini berbanding terbalik dari kelompok minoritas Cina yang mampu menguasai kota dan mengembangkan pusat-pusat bisnis serta menguasai lahan berlebih di inti kota.

Namun, dari segi realitas politik, sosial, dan budaya, kaum migran Jawa dan Cina ini sesungguhnya mendapatkan perlakuan yang sama dari kelompok elite yang ada di pemerintahan. Orang Jawa, meskipun merupakan penduduk mayoritas, namun jarang mendapatkan posisi-posisi penting dan strategis di tubuh pemerintahan, dari mulai jabatan di Kelurahan, Kecamatan hingga di Pemerintah Kota. Orang Cina lebih parah lagi. Meski mereka mendominasi lahan bisnis dan pemukiman yang memiliki lahan berlebih, namun sering kali mendapatkan diskriminasi pelayanan dibandingkan penduduk pribumi.

Begitupun, dibandingkan masyarakat Jawa, masyarakat Cina tetap mendapat perlakuan istimewa pejabat elite pemerintahan. Dari data yang ada di Dinas

Pertamanan Kota Medan tahun 1999³, misalnya, tercatat jumlah ruang terbuka untuk publik hanya 228,03 hektar atau hanya sekitar 0,86 persen dari luas total kota Medan yang berjumlah 26.510 hektar. Ruang publik itu dikalahkan oleh kepentingan bisnis dan permukiman eksklusif yang didominasi masyarakat Cina. Bahkan, ruang publik tersisa itu banyak dikuasai pengusaha etnis Cina beserta pejabat di pemerintahan.

Pertarungan kepentingan antara orang Jawa dan Cina berebut peran dalam keruangan kota Medan ini menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan studi di Program Studi Antropologi Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Peran orang Jawa dan Cina dalam keruangan kota Medan ini tentunya harus sejalan dengan studi antropologi guna mengamati gejala perkembangan kota di Medan berdasarkan penelitian-penelitian dari para peneliti sebelumnya.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran orang Jawa dan Cina dalam keruangan kota Medan. Dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- mendeskripsikan peran orang Jawa dan Cina dalam keruangan kota Medan.
- mendeskripsikan faktor penghambat dan pendorong yang dialami orang Jawa dan Cina dalam keruangan kota.
- mendeskripsikan usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Medan sebagai upaya meningkatkan peran

³ Ampun, Nuh Anak. *Sikap WNI Keturunan Cina terhadap Pembauran di Pemkot Medan dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Tesis : Universitas Indonesia, 2002

orang Jawa dan Cina dalam keruangan kota.

1.3 Masalah Penelitian

Dari latar belakang dan tujuan penelitian, peneliti membatasi masalah yakni “Bagaimana peran orang Jawa dan Cina dalam keruangan kota Medan, faktor penghambat dan faktor pendorong orang Jawa dan Cina dalam keruangan kota Medan serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan meningkatkan peran orang Jawa dan Cina dalam keruangan kota Medan untuk menata dan mengembangkan kota Medan.”

1.4 Tinjauan Teoretis

Mayer via Hari Tri Budianto dalam Koestoer (2001 : 109), misalnya, melihat kota sebagai tempat bermukim penduduknya. Baginya yang penting bukan rumah tinggal, jalan raya, rumah ibadah, kantor, taman, kanal, dan sebagainya, melainkan penghuni yang menciptakan segalanya itu. Sementara Max Weber memandang suatu tempat itu kota, jika penghuninya sebagian besar telah mampu memenuhi kebutuhannya lewat pasar setempat. Adapun barang-barangnya dibuat setempat pula ditambah yang dari pedesaan. Ini dasar sifat kosmopolitan kota yang menjadi hakikat kota. Sehubungan dengan itu, ciri khas kota adalah pasarnya.

Christaller (*ibid*) dengan *Teori Tempat Pusat* menunjukkan fungsi kota sebagai penyelenggaraan dan penyediaan jasa-jasa bagi sekitarnya. Kota merupakan pusat pelayanan. Kota pada awalnya bukan tempat permukiman, melainkan pusat pelayanan. Sedangkan Wirth merumuskan kota sebagai pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dengan penduduk yang heterogen kedudukan sosialnya. Karena itu, hubungan sosial antara penghuninya serba longgar, acuh, dan relasinya bukan

pribadi. Lalu, C.D. Harris dan F.L. Ullmann (1945 via Yunus, 2001 : 44) melihat kota sebagai pusat untuk pemukiman dan pemanfaatan bumi oleh manusia. Manusia di situ menempati dan mengeksploitasi sumber daya bumi. Ini, mendorong pertumbuhan kota yang pesat, tetapi menimbulkan terjadinya pemiskinan, sehingga muncul berbagai masalah sosial.

Dari berbagai macam pendapat ahli tersebut, terdapat interaksi sangat kompleks dalam sebuah kota, baik organisasinya, kebudayaannya, pusat pelayanannya (pasar) maupun penduduk, masalah sosial, dan sebagainya. Organisasi spasial/keruangan kota⁴ merupakan susunan tata ruang yang membentuk suatu struktur teratur tertentu. Organisasi keruangan kota merupakan hasil karya dan upaya manusia yang memberi ‘warna’ dan karakteristik keruangan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya terhadap kota bersangkutan.

Raldi Hendro Koestoer dalam bukunya, *Dimensi Keruangan Kota*, menyebutkan, untuk memahami organisasi struktur keruangan kota perlu diketahui paling tidak dua komponen dasar pembentuknya, yaitu pola penyebaran penduduk dan pola penyebaran pembangunan kesejahteraan.⁵ Kombinasi kedua komponen itu membentuk suatu struktur organisasi

⁴ *Ibid*.

⁵ Raldi Hendro Koestoer dalam *Dimensi Keruangan Kota* (2001 : 1) menyebutkan, pola penyebaran pemukiman merupakan salah satu indikasi penyebaran konsentrasi penduduk, sedangkan manusia sebagai pemegang peran penting dalam perubahan dimensi spasial perkotaan, khususnya dalam aspek nonfisik kota. Pola penyebaran kesejahteraan secara langsung berkaitan dengan pembangunan ekonomi kota. Pemahaman spasial ekonomi kota, menurutnya, membantu seseorang untuk dapat melihat potensi kota yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi pengembangan kota di masa depan, termasuk pembangunan manusianya.

keruangan kota yang kompleks dan memberi arti tertentu bagi penampilan spasial wilayah perkotaan.

Koestoeer menyebutkan, konsentrasi penyebaran pemukiman penduduk suatu kota berpola tidak menentu, baik dalam skala besar maupun mikro. Penyebaran pola pendapatan tentunya akan cenderung menunjukkan struktur pola yang lebih variatif atau sangat tidak beraturan. Pola ketidakberaturan distribusi pendapatan dapat ditunjukkan dalam ranah pola distribusi pendapatan tinggi hingga rendah. Pada wilayah yang memiliki pola distribusi pendapatan rendah, biasanya akan tampak lingkungan pemukiman yang cenderung kumuh. Lingkup deskripsi ini dapat mengindikasikan bahwa penyebaran pemukiman kumuh berkorelasi erat dengan pendapatan rendah. Pada skala yang lebih besar, kelompok rumah tangga di wilayah ini akan banyak ditemui sebagai kelompok penganggur. Gambaran-gambaran seperti ini, menurut Koestoeer, dapat memberikan pengetahuan mendasar tentang pola keruangan kota.

Terry McGee (1963) via Evers (1995 : 9) mengonstruksikan sebuah model kota, ketika sebuah sektor dikuasai perekonomian "type firma" sedangkan sektor lainnya oleh perekonomian "type bazar" mengalami kemunduran. Di dalamnya, terdapat terutama para migran yang berasal dari daerah pedalaman, yang di kota besar menjalani cara hidup "semidesa" sehingga seperti "petani-petani kota". Ekonomi "type bazar", menurut McGee, secara empiris dapat dikonstatasi dan terutama yang digambarkan para antropolog kota bukanlah merupakan peninggalan atau kelanjutan sebuah bentuk ekonomi masyarakat tradisional, melainkan suatu bentuk organisasi masyarakat dan ekonomi yang timbul dan dipelihara dalam proses urbanisasi yang dinamis.

Trio R.E. Park, E.W. Burgess, dan R.E.

McKenzie⁶ yang membawa aliran Chicago dalam penelitiannya tentang kota menunjukkan, persebaran kelompok heterogen dalam kota tidak berlangsung secara liar. Sebab, ada pengelompokan berdasarkan ras ataupun keagamaan dan pekerjaan. Dua yang pertama dapat saja berhimpitan sehingga merupakan suatu *natural area* merangkap *cultural area*. Yang dimaksud dengan *natural area*, pertama, berdasarkan tujuan penggunaan tanah (untuk perumahan, pertokoan, rekreasi, perkantoran, dan sebagainya). Kedua, adalah berdasarkan tipe penduduk atau penghunian, misalnya daerah kaum pribumi, keturunan asing, pensiunan, kaum intelek, dan sebagainya. Acapkali, tiap *natural area* tipe kedua ini memiliki adat istiadat, gagasan-gagasan dan pandangan hidup khas, karena latar-belakangnya adalah kultural, sehingga daerah demikian disebut *cultural area*.

Dari struktur sosial itu, tak ayal Hans-Dieter Evers⁷ melihat kota-kota besar modern di Asia Tenggara dewasa ini berasal dari kota-kota yang didirikan pemerintah kolonial pada masa lalu, misalnya Jakarta, Kuala Lumpur, Rangoon, dan Singapura. Kota-kota ini telah direncanakan dan bertumbuh berdasarkan asumsi bahwa suku dan asal etnik merupakan prinsip-prinsip utama dari organisasi sosial. Karena itu, daerah-daerah perkotaan diatur dalam segmen-segmen yang memisahkan etnis-etnis dalam lokasi-lokasi pemukiman yang terpisah-pisah sehingga terbentuklah kampung-kampung untuk orang-orang Eropa, Cina, Ambon, Madura, Bugis, Jawa, Sunda, dan sebagainya.

Pola pemukiman etnik ini kemudian terganggu oleh datangnya para imigran besar-besaran dari Cina dan India sehingga terjadilah peluapan di

⁶ Menno dan Alwi, 1992 : 7

⁷ *lokcit*

pemukiman-pemukiman etnis Cina dan India. Gelombang-gelombang etnis itu berbaaur dan bercampur di pasar-pasar, atau di tempat-tempat umum lainnya, tetapi tidak terjadi integrasi dalam perpaduan rasial. Malah mereka yang terasimilasi membentuk golongan-golongan tersendiri, terpisah dari golongan asli atau asalnya. Di samping pengelompokan secara etnis, dalam perkembangan selanjutnya terjadi lagi pemisahan menurut status sosial di dalam etnis masing-masing, sehingga terbentuk lagi kelas-kelas⁸.

Perencanaan Kota (*Urban Planning*) oleh para *planner* di abad ke-20 telah mengarahkan kota-kota di dunia menjadi tidak berkelanjutan. Indikasi hal tersebut dapat terlihat dari masalah-masalah umum kota metropolitan a.l:

- Perencanaan sistem transport yang didominasi oleh mobil dengan semua infrastruktur jalannya telah menyebabkan : kemacetan, polusi, pemborosan energi, dan persoalan lahan parkir.
- Kerusakan lingkungan oleh pembangunan gedung dan infrastruktur.
- Penentuan *zonasi* dengan satu fungsi lahan yang mendominasi.
- Kesenjangan pendapatan, kelas sosial, dan diskriminasi ras.
- Meningkatnya kriminalitas dan *vandalisme*.
- Ruang antarbangunan tidak ditata sehingga fungsi-fungsi dan masyarakat terisolasi.
- Pejalan kaki dan aktivitas publik di ruang kota menjadi terpinggirkan.
- Hilangnya identitas kota.
- Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.
- Bidang fisik dan prasarana : pemanfaatan ruang dan

kecenderungan fisik kota yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kabupaten/kota lainnya.

- Kegiatan ekonomi dan sosial cenderung terpusat.
- Masalah manajemen lalu lintas, drainase, perumahan/permukiman, tata guna lahan ruang terbuka hijau dan pelestarian lingkungan hidup dan bangunan bersejarah.
- Bidang Ekonomi : masalah pengangguran dan kemiskinan.
- Bidang Sosial Budaya : rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan, masalah kriminal, kenakalan remaja, anak jalanan, kawasan kumuh, dan kurangnya pembinaan kekayaan seni budaya lokal.

Dari uraian di atas, maka penataan ruang dapat didefinisikan sebagai berikut:

- Instrumen pembangunan untuk mengarahkan pola pemanfaatan ruang dan struktur ruang yang disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kaidah teknis, ekonomis, dan kepentingan umum
 - Suatu upaya untuk mewujudkan tata ruang yang terencana melalui suatu proses yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang saling terkait
 - Suatu upaya untuk mencegah perbenturan kepentingan antar sektor, daerah dan masyarakat dalam penggunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan melalui proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Maka, penataan ruang dalam konteks

⁸ Menno dan Alwi, 1994 : 88

penelitian ini dimaksudkan untuk menciptakan rencana tata ruang modern yang efektif dan berwawasan lingkungan guna mendukung Medan sebagai kota metropolitan dengan struktur ruang yang disepakati pemerintah dan masyarakat kota (partisipatif) sebagai dasar pemanfaatan/pengelolaan dan pengendalian pembangunan kota. Menurut Freeman (1974)⁹, kota mempunyai 4 (empat) kecirian, meliputi penyedia fasilitas untuk seluruh warga, penyedia jasa (tenaga), penyedia jasa profesional (bank, kesehatan dan lain-lain), dan memiliki pabrik (industri). Kota bahkan dianggap sebagai pusat pasar, sehingga perdagangan merupakan basis jaringan dalam suatu kota¹⁰.

Dari struktur dan klasifikasi perkotaan itu, akhirnya membentuk suatu sistem perencanaan kota metropolitan. Menurut Calthrope, perencanaan kota metropolitan ini terbagi empat jenis, yakni *eco-city*, *regional city*, *TOD*, dan *compact city*. *Eco-city* adalah konsep pendekatan perencanan kota yang berkelanjutan atau *sustainable*, untuk menjadikan kota aman dan nyaman, manusiawi, hemat energi dan ramah lingkungan, tanggap dan akomodatif terhadap kekhasan sosial budaya serta aksesibilitas yang mudah.

Kota regional (*regional city*) adalah penyempurnaan dari konsep kota

metropolitan. Jenis kota ini merupakan jaringan *kota-kota kompak* baik *kota lama* atau *kota baru* sebagai suatu konstelasi kota-kota dalam kawasan regional dengan sebuah kota utama sebagai 'hub' Jaringan kota-kota tersebut merupakan jaringan komunitas, jaringan ekonomi, jaringan budaya, jaringan ruang terbuka yang terbentuk karena adanya 'tulang punggung' jaringan, yaitu : kereta api atau bus sebagai transportasi massal (TOD).

Kota regional ini juga dimaksudkan untuk menghindari penggunaan lahan pertanian, ruang terbuka, hutan, dan jalur hijau di luar batas kota sebagai lahan perkotaan. Kota regional merupakan suatu unit yang saling terkait secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Seluruh lingkungan kota dan komunitas memainkan peran penting dalam menciptakan satu kesatuan kawasan metropolitan. Konsep ini menjadikan kota-kota sebagai tempat hunian yang manusiawi, dan ramah lingkungan

Transit Oriented Development (TOD), adalah konsep pembangunan berpusat pada titik transit. Intensitas pembangunan dan aktivitas warga dipusatkan di sekitar terminal/stasiun transportasi massal (bus, KA, LRT atau *subway*). Tata Guna Lahan Pada Pusat (TOD) ini merupakan lahan campuran atau *mix use*. Jarak dan luas menjadi penting karena penataan pusat pembangunan tersebut berada dalam jarak tempuh maksimal 10 menit berjalan kaki

Dalam konstelasi kota-kota regional, TOD merupakan jaringan sistem kereta api dengan kota utama sebagai pusat dan 'hub'. Setiap perhentian merupakan pusat kota sebuah *kota kompak*, yang terdapat fungsi lahan campuran dengan toko-toko, perumahan dan fasilitas publik yang dapat dicapai dengan 10 menit berjalan kaki. Kota kompak (*compact city*), lahir sebagai penerjemahan konsep *sustainable city*. Kota yang kompak akan mereduksi jarak

⁹ *ibid.*

¹⁰ Berdasarkan definisi itu pula, pengelasan kota secara kualitatif dapat diidentifikasi dalam 4 jenis, yaitu : (a) kota komersial, (b) kota industri, (c) pusat politik, dan (d) pusat sosial dan kesehatan. Sedangkan penggolongan kota berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 6 kelas, yakni : (a) Administrasi, contohnya ibu kota; (b) Pertahanan, contohnya kota benteng; (c) Kebudayaan, contohnya pusat agama atau kota universitas; (d) Produksi, contohnya pusat kerajinan atau pabrik; (e) Komunikasi, contohnya pusat transportasi, dan (f) Rekreasi, contohnya resor atau pusat kesehatan.

tempuh, emisi dan efek rumah kaca berdampak kepada ongkos transport lebih murah, lebih sedikit polusi, dan biaya pengondisian udara yang murah serta terbentuknya komunitas social. Menurut Jenks, transportasi kota kompak bertumpu kepada jaringan pejalan kaki dan transportasi massal seperti Bus atau Kereta Api.

1.5 Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan mengkaji masalah peran orang Jawa dan Cina dalam keruangan kota Medan sebagai sebuah studi antropologi dalam pengembangan dan penataan kota Medan. Ilmu antropologi memang mempelajari suatu gejala kemanusiaan mengenai suatu fenomena kemasyarakatan. Melalui disiplin antropologi penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu rekomendasi berkenaan peranan orang Jawa dan Cina dalam keruangan kota Medan. Sebagai sebuah produk antropologi pula, penelitian ini menjadi sangat penting guna mengungkap peran masyarakat pada umumnya terhadap pembangunan di kota Medan.

Namun, masyarakat tampaknya acap kali dilihat sekadar sebagai konsumen yang pasif. Memang mereka diberi tempat untuk aktivitas kehidupan, kerja, rekreasi, belanja dan bermukim, akan tetapi kurang diberi peluang untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan dan perencanaannya. Padahal, sebagai makhluk yang berakal dan berbudaya, manusia membutuhkan rasa penguasaan dan pengawasan terhadap habitat atau lingkungannya. Rasa tersebut merupakan faktor mendasar dalam menumbuhkan rasa memiliki untuk kemudian mempertahankan atau melestarikan. Dalam sistem hierarki kebijakan publik, Pemerintah Kota dan DPRD Medan pada tingkat politis membuat, menyusun, dan merancang mekanisme dan hukum-hukum mengenai masalah publik, di antaranya –

tentunya – adalah keruangan kota. Aturan yang disusun para pengambil kebijakan itu seterusnya dilaksanakan oleh lembaga atau badan pada tingkat organisasi, yakni Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan sebagai pelaksana program dan aturan yang telah disusun pemerintah.

Selanjutnya instansi ini mengimplementasikan kepada publik pada tingkat operasional. Di antara publik itu adalah orang-orang Jawa dan Cina yang tinggal dan menetap serta menjadi warga Kota Medan. Sebagai warga kota, orang-orang Jawa dan Cina ini berkewajiban melaksanakan aturan yang dibuat pemerintah. Sebaliknya, orang-orang Jawa dan Cina seharusnya juga berhak menentukan arah kebijakan yang menyangkut publik ini, apalagi jika kebijakan itu mengenai masalah nasib dan masa depan mereka sebagai warga kota. Melalui saluran politik yang ada, orang-orang Jawa dan Cina juga perlu memberi akses kepada lembaga-lembaga atau badan-badan di tingkat organisasi dan politis.

Dibukanya secara luas ruang-ruang publik dalam proses formulasi sampai evaluasi kebijakan, adalah keharusan yang mutlak dilakukan jika pemerintah ingin mendapatkan legitimasi warganya. Bukan saatnya lagi orang-orang Jawa dan Cina selaku warga kota dipandang sebagai pihak yang bisa dibodoh-bodohi seperti pada sebelum masa otonomi daerah. Orang-orang Jawa dan Cina sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang ada di Kota Medan adalah pihak yang berhak tahu dan dilibatkan dalam proses yang terjadi. Berdasarkan uraian di atas, skema pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6 Kajian Pustaka

Masalah orang Jawa dan Cina ini pernah diteliti secara khusus oleh P. Hariyono dalam bukunya, *Kultur Cina dan*

Jawa : Pemahaman Menuju Asimilisi Kultural (1994). Hariyono meneliti dari segi hubungan kultur orang Jawa dan Cina di Yogyakarta. Penelitian terbaru tentang orang Jawa dan Cina dilakukan Achmad Habib dalam bukunya, *Konflik Antaretnik di Pedesaan : Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa* (2004), yang meneliti masalah konflik Cina dan Jawa di pedesaan Sumberwedi, Jawa Timur.

Menurut Habib, pada awal perkembangannya, Cina datang ke pedesaan untuk berdagang. Kemudian, Cina melihat bahwa tanah di pedesaan itu subur. Maka, ia punya inisiatif untuk menyewa tanah pertanian. Orang Jawa yang pada dasarnya punya lahan yang luas tentu tidak keberatan. Bahkan tak sedikit dari orang Cina itu yang mengawini gadis desa. Dari sini, hubungan Cina dan Jawa dimulai.

Lambat laun, Cina merasa bahwa tanah itu merupakan sumber utama kehidupannya. Bagi petani yang punya sawah itu juga tidak jauh berbeda. Akhirnya, konflik pun mulai muncul. Cina dengan strategi mempekerjakan orang Jawa atau bahkan yang punya sawah itu sendiri. Akhirnya, ketergantungan Jawa pada Cina sedemikian besar.

Hal sama tampaknya terjadi di tingkat perkotaan. Di Kota Medan, misalnya, orang Cina sangat menguasai lahan dan bahkan memiliki lahan berlebih dibandingkan orang Jawa yang seperti tersingkir di pinggiran kota. Konsep keruangan kota yang direncanakan Pemerintah Kota Medan seolah-olah makin memberi peluang bagi orang Cina untuk menguasai wilayah perkotaan, terutama kawasan inti kota. Akibatnya, orang Jawa yang mendominasi jumlah penduduk di Kota Medan tidak bisa berbuat banyak¹¹. Namun, masalah

tersebut akhirnya meledak juga. Orang Cina bahkan umumnya seperti meminggirkan kaum pribumi pada umumnya dalam *central bisnis distrik* (CBD) Kota. Peristiwa Mei 1998 adalah bukti dari terakumulasinya kemarahan kaum pribumi pada umumnya terhadap orang Cina.

Lebih jauh dari masalah ini, persoalan yang kemudian penting dalam pembangunan –dengan menggunakan paradigma kemasyarakatan ini–adalah seberapa jauh peran orang Jawa dan Cina ini sebenarnya dimasukkan sebagai indikator keberhasilan suatu pembangunan. Melalui model partisipasi masyarakat ini, pembangunan tidak lagi sekadar hasil dari proses pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemerintahan dan modal (*top down*), tetapi menjadi lebih penting mengenai peran serta dan keterlibatan masyarakat (proses sosial dan berciri komunitarian) dalam proses pembangunan. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengadakan penelitian, apakah peran orang Jawa dan Cina dilibatkan dalam konsep pembangunan di tengah keruangan kota Medan saat ini.

Sebagaimana diketahui, tujuan utama dari Ethnografi atau Antropologi Sosial adalah untuk menguraikan dan menganalisis sistem-sistem sosial dari

munculnya kelompok budaya dominan. Komponen pertama adalah faktor jumlah penduduk; kedua, budaya setempat; ketiga, kekuasaan yang dimiliki kelompok tersebut. Dengan memperhatikan ketiga komponen itu, maka kota Medan merupakan kota yang tidak memiliki budaya dominan karena tidak satu etnis pun yang ada di kota ini memiliki ketiga komponen tersebut. Etnis Jawa, misalnya, memang di Medan merupakan terbanyak dalam jumlah, tetapi etnis Jawa bukan penduduk asli Medan sehingga tidak memiliki komponen kedua, yakni budaya setempat. Sebaliknya, etnis Melayu sebagai pendukung budaya setempat, merupakan kelompok etnis yang berada dalam jumlah minoritas (Pelly, 1987 : 32).

¹¹ Sekurang-kurangnya, menurut Bruner (1974), ada tiga komponen yang sangat menentukan bagi

berbagai aspek yang dapat menyokong sebuah teori sosial secara umum. Dari sistem sosial itu, orang-orang tentu akan menerima beberapa pemikiran pokok yang bisa memengaruhi pergerakan romantisisme nasional, yang menuliskan orang yang berkarakteristik nasional. (Izikorvitz, 1969).¹²

Menurut Izikorvitz, setiap kelompok tentu ingin segera memperbaiki status kelompoknya dan menginginkan cara hidup yang mulia, ingin menghadapi problem-problem yang ada di dalam kehidupan bertetangga terutama hubungan antara penduduk yang tempat tinggalnya berbeda. Mempelajari suatu tempat tinggal dapat memisahkan masyarakat antara yang mono-etnis berubah menjadi kelompok yang poli-etnis.

Dalam kaitan ini, keruangan kota Medan berarti adalah hasil karya dan upaya manusia yang memberi 'warna' dan karakteristik keruangan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya kota Medan. Karenanya, keruangan kota Medan harus pula sesuai dengan karakteristik dan tipikal masyarakat Medan. Hanya saja, karena tidak adanya budaya dominan di kota ini mengakibatkan pertarungan kepentingan di tengah kemajemukan warga kota tak bisa terelakkan. Maka, sebagaimana disetir Hanners, ada dua kelompok yang bertarung dalam perebutan sumber. Kelompok pertama adalah orang Jawa yang mewakili representasi pribumi dan kelompok kedua adalah orang-orang Cina yang menginginkan jumlah sumber sebesar mungkin.

Dalam penelitian ini, maka peran orang Jawa dan Cina dalam keruangan kota Medan -- yang akan ditinjau dari studi antropologi -- sesungguhnya dapat

diketahui dari tahap menentukan sesuatu yang akan dituju dan tujuan yang akan dihasilkan, biasanya disebut dengan tahap rumusan kebijakan dan rencana. Selanjutnya, diikuti peran pada tahap menentukan cara untuk mencapai tujuan dan mempertaruhkan sumber daya agar tujuan dapat dicapai. Akhirnya, peran orang Jawa dan Cina nantinya akan sampai pada tahap mencapai kesamaan pandangan tentang bagaimana memantau dan menilai hasilnya.

1.7 Metode Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih, yakni "*Peran Orang Jawa dan Cina dalam Keruangan Kota: Sebuah Studi Antropologi dalam Pengembangan Penataan Kota Medan*", penelitian ini termasuk kategori studi emperis yang bermaksud mengamati gejala-gejala sekelompok sosial dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Dilihat dari disiplin keilmuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif melalui disiplin ilmu antropologi perkotaan dan etnologi.

Hal ini sesuai dengan ilmu tersebut sebagai ilmu yang mengkaji asal mula kehadiran kota beserta perkembangannya dalam lingkup kebudayaan kota. Berdasarkan pendekatan ini, partisipasi masyarakat dipandang sebagai fenomena social yang dapat berubah karena perbedaan-perbedaan situasi sosial dan perkembangan budaya.

Karena itu, penelitian ini mengombinasikan pendekatan diakronik studi perkotaan dalam konteks masyarakat yang lebih luas, yakni : (1) melihat hubungan ideologis yang mengikat kota dan desa secara timbal balik, dan (2) menelusuri interaksi kota sebagai sebuah faktor sosio-ekonomis dan politik dalam satu kesatuan organisasi masyarakat (Fox, 1974; Pelly, 1984 : 7-18) serta (3) mengintegrasikan konsep "adaptasi" (Bruner, 1974 ; Pelly, *ibid*) yang

¹² Tulisan Izikorvitz ini secara lengkap terdapat dalam buku "*Kelompok Etnik dan Batasannya*" (Barth, 1988 : 146-160).

kreatif untuk melihat hubungan kota dengan proses perubahan sosial – dalam konteks keruangan kota.

Di sisi lain, dari segi metodologis proses penelitian dikembangkan melalui pendekatan emik, yaitu suatu model pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang menekankan pada realitas, tanpa dicampuri interpretasi lebih jauh. Hal ini berarti, penelitian ini lebih tepat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki dan memecahkan masalah yang tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data. Metode ini juga digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta sekaitan masalah yang diteliti sebagaimana adanya.

2. Pembahasan

KAJIAN tentang etnik sebagai sekelompok manusia yang mempunyai kebudayaan sama, berkembang dari ranah biologik menuju ranah kebudayaan dan akhirnya bermuara pada ranah politik. Kajian aspek sosio-politik tentang etnik ini disebut studi etnisitas (Diamond dan Plattner : 1998).

Menurut Barth (1998:1), kelompok etnik adalah suatu populasi yang secara biologik mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan kebersamaan dalam bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, menentukan sendiri ciri kelompoknya, yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi kelompok lain. Sebagai pembeda satu sama lain, lazimnya suatu etnik mempunyai tanah leluhur sendiri merupakan ciri khas etnik yang membedakannya dengan ras.

Sejalan dengan Barth, Izikorvitz menyebutkan, setiap kelompok tentu ingin segera memperbaiki status kelompoknya

dan menginginkan cara hidup yang mulia, ingin menghadapi problem-problem yang ada di dalam kehidupan bertetangga terutama hubungan antara penduduk yang tempat tinggalnya berbeda. Mempelajari suatu tempat tinggal dapat memisahkan masyarakat antara yang mono-etnis berubah menjadi kelompok yang poli-etnis.

Juga sebagaimana dituturkan oleh Warnaen (2002), sejak tahun 1970-an, masalah etnik kembali tampil ke pentas politik. Didorong oleh berbagai kekecewaan berlarut dalam negara nasional, telah muncul gerakan-gerakan etnik yang mengajukan ragam tuntutan politik. Karena itu, Toffler (1990) pun meramalkan bahwa masalah etnik akan berlanjut terus. Kalau di negara-negara maju yang menganut kebijakan multikultural seperti Australia saja, masih berlangsung prasangka dan ketegangan antaretnik, bisa dibayangkan bagaimana potensi masalah etnik ini dalam konteks kebhinnekaan etnik di Republik Indonesia.

Karena itu, kajian mendalam terhadap relasi antaretnik amat perlu bagi kesatuan dan ketahanan sosial. Disukai maupun tidak, realitas etnik ada dalam sebagian besar negara nasional. Menurut Koentjaraningrat (1993), dari 175 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hanya 12 negara yang penduduknya relatif homogen. Karena itu, pengabaian terhadap masalah etnik dapat menyebabkan terjadinya kejutan berupa gejala sosiopolitik.

Lazimnya, berdasarkan ciri-ciri utama biologiknya, umat manusia dikelompokkan ke dalam berbagai ras. Bila ras tersebut dikaitkan dengan kebudayaan mereka, maka terbentuk kelompok etnik. Karena itu, dari satu ras yang sama, bisa terbentuk berbagai etnik. Setiap manusia pasti menjadi warga dari salah satu ras dan etnik. Dari latar belakang ras dan etnik itu pula, suatu masyarakat membentuk tipe kepribadian dasar, yang selanjutnya

menjadi acuan bagi pembentukan kepribadian warganya (Linton, 1962: 110-111).

Dalam konteks Indonesia, perbedaan kultural yang relatif besar memang terdapat antara penduduk Indonesia asli dengan warga keturunan Cina. Secara kultural, mayoritas rakyat Indonesia lebih intensif memperoleh pengaruh dari kebudayaan India dibanding dengan kebudayaan Cina. Padahal, antara kedua orientasi budaya terdapat perbedaan cukup besar.

Dibandingkan Cina, masyarakat Jawa mempunyai inspirasi kebudayaan Hindu yang diwariskan dari India. Dalam sistem kepercayaan dan praktiknya, hampir merupakan suatu perwujudan dari keseluruhan pandangan hidup Hindu. Sebaliknya orang Cina menekankan hal yang bersifat konkret, tidak menyukai pikiran abstrak, menekankan hal yang bersifat partikular, konservatif, kepatuhan secara formal, cenderung bersikap praktis, individualistik, menghormati alam, serta menginginkan rekonsiliasi dan harmoni.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis di lapangan, secara sosio-ekonomi, posisi ekonomi yang kuat dari warga negara Indonesia keturunan Cina telah berhadapan dengan ketertinggalan warga negara Indonesia asli. Secara historis, posisi ekonomi tersebut berawal dari kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang menjadikan orang Cina sebagai kalangan menengah (*middlemen*). Masalah ini dipersulit lagi oleh kecenderungan warga keturunan Cina untuk bersikap eksklusif, sesuai dengan kebudayaan leluhurnya.

Penduduk keturunan Cina bukan hanya terlihat sebagai orang luar (*out group*), tetapi juga menempatkan dirinya sebagai orang luar. Umumnya, badan usaha-badan usaha milik etnik Cina hampir tidak pernah memercayakan jabatan-jabatan puncak manajemen

kepada tenaga profesional yang bukan etnik Cina. Demikian pula, perkawinan campuran antara Cina dan yang bukan Cina amat jarang terjadi. Dengan demikian, baik dalam sistem ekonomi maupun dalam sistem sosio-budaya, secara umum etnik Cina tampak terpisah dari masyarakat lingkungan sekitarnya (Koentjaraningrat, 1993; 16).

Berkaitan itu, studi tentang etnisitas di dalam masyarakat perkotaan, sering memusatkan perhatian pada ketegangan dan kesamaan antara dua prinsip organisasi. Di satu pihak terdapat kelompok-kelompok yang bersifat kebudayaan, sejarah, dan geografis yang anggota-anggotanya menganggap diri mereka (dan dipandang oleh orang lain) sebagai satu jenis, tak soal apapun peranan yang mereka mainkan dalam masyarakat perkotaan. Di lain pihak, ada pula perbedaan fungsional di dalam sistem itu sendiri, dengan distribusi tugas dan sumber-sumber serta dengan sistem penempatan tertentu, yang akan menentukan interes kepada kecenderungan tertentu (Hanners, 1974).¹³

Kota Medan terdiri dari masyarakat majemuk. Ciri utama dari masyarakat majemuk, menurut Furnivall (1980)¹⁴, adalah orang hidup berdampingan secara pisik, tetapi, karena perbedaan sosial mereka terpisah dan tidak tergabung dalam satu unit politik. Furnivall menekankan sebab utama kemajemukan itu, yaitu ekonomi dan kepentingan sekitar usaha monopoli sumber-sumber ekonomi tersebut bagi kelompok tertentu. Sejalan dengan Furnivall, maka dalam penelitian ini, orang Jawa dan Cina yang tinggal di

¹³ Tulisan Ulf Hanners dapat terlihat dalam *Urban Ethnicity*-nya Abner Cohen (1974 via Pelly, 1987 : 34-36).

¹⁴ Furnivall, J.S. *Plural Societies*, dalam Evers, Hans Dieter (ed), *Reading in Social Change and Development*. Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1980 (Pelly, 1987 : 22-23)

Kota Medan sesungguhnya hidup berdampingan secara fisik, apalagi sama-sama menjadi warga pendatang. Namun, *toh*, mereka harus terpisah dan tidak tergabung dalam satu unit politik.

Menurut Hanners (*op.cit*), dalam masyarakat perkotaan kita dapat membedakan dua jenis kelompok yang terlibat dalam perjuangan memperebutkan sumber. Pertama, ialah kelompok etnis yang tidak secara tegas dibatasi oleh suatu posisi dalam struktur masyarakat perkotaan tetapi oleh tempat pemukiman. Sedangkan alokasi sumber dalam tempat pemukiman itu tidak menjadi persoalan. Kelompok ini didominasi etnis Jawa. Orang Jawa tidak pernah mempersoalkan adanya perbedaan pelayanan bidang usaha oleh pejabat setempat. Meskipun mereka berada di kawasan pinggiran dan menjadi 'penonton' di tengah kemegahan wajah kota, hingga kini orang Jawa tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Sikap budaya Jawa seperti *mikul ngisor mendem njero* menjadi senjata ampuh bagi pemerintah untuk meneruskan program-program pembangunan.

Kelompok lainnya adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang pada suatu daerah pemukiman yang membatasi diri menurut daerahnya dan juga menginginkan jumlah sumber sebesar mungkin di kalangan mereka. Kelompok ini sangat identik dengan kultur Cina, khususnya di Medan. Banyak orang Cina membatasi dirinya pada kawasan tertentu. Bahkan, mereka seolah-olah membuat perkampungan tertutup yang akrab disebut *Pecinan*. Beberapa lokasi di Medan, seperti Kompleks Asia Mega Mas dan Rumah Susun Sukaramai maupun di kawasan Jalan Metal Tanjungmulia, mereka membuat segregasi tersendiri. Ini, belum lagi dengan banyaknya yang tinggal di kawasan rumah toko.

Mengutip pendapat Furnivall dan Hanners itu, maka dalam konteks

penelitian ini, pertarungan kepentingan antara kelompok etnis Jawa dan Cina sesungguhnya sangat kentara dalam kaitan penataan keruangan kota¹⁵ di Medan. Hubungan laten antara etnik asli Indonesia dengan etnik Cina seperti 'api dalam sekam". Kalau dalam pada 1970-an terjadi huru-hara anti Cina di beberapa kota besar di Jawa, maka pada April 1994 dan Mei 1998 berlangsung aksi anti Cina di Medan. Persaingan dan pertikaian demikian, ternyata tidak hanya berlangsung pada tataran batin atau dunia simbolik, tetapi juga mengemuka pada tataran perilaku. Sebab, ada cukup laporan bahwa pada kerusuhan sekitar reformasi 1998-pun ditengarai memuat kecenderungan untuk memusuhi etnik Cina.

Namun, para narasumber yang penulis wawancarai membantah konflik yang pernah terjadi di Medan adalah lantaran masalah perebutan ruang publik di kota Medan, melainkan kesenjangan sosial. Para narasumber berkeyakinan, konflik antara orang Jawa dan Cina sebagai akibat keruangan kota yang ada di kota Medan, dalam sejarah, sampai hari ini tidak terjadi.

Konflik antaretnik di kota Medan tidak terjadi karena jumlah penduduk Cina dianggap tidak signifikan. Orang Jawa yang besar jumlah penduduknya lebih signifikan dari yang lain tidak menjadi sumber konflik karena memang Jawa tidak punya potensi untuk bikin konflik. Bahkan, orang Jawa di Medan mudah bersosialisasi dengan etnis apa saja.

Hal tersebut ini sejalan dengan dasar moral masyarakat Jawa. Mulder (1981) menyatakan, orang Jawa sadar sekali bahwa mereka merupakan satu

¹⁵ Keruangan kota, menurut Koestoer (2001: 2), merupakan hasil karya dan upaya manusia yang memberi 'warna' dan karakteristik keruangan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya terhadap kota yang bersangkutan.

masyarakat dan bahwa mereka harus saling menolong. Sering mereka diminta sokongan, untuk kampung, untuk pembangunan, untuk kematian dan seterusnya, dan mereka harus memberi. Sikap tolong-menolong itulah yang membuat orang Jawa disenangi banyak orang, termasuk oleh orang Cina.

Orang Jawa dan Cina sebenarnya memiliki nilai sosial suka tolong-menolong dan punya solidaritas yang tinggi pada sistem kekerabatan. Hanya bedanya, pada kultur Tionghoa penekanan kepentingan keluarga lebih utama daripada individu dan masyarakat¹⁶. Sedangkan pada kultur Jawa hubungan antarindividu, keluarga, dan masyarakat cukup seimbang. Hal ini tampak pada budaya Jawa yang cenderung *conform* dengan sesamanya (masyarakat), serta dikembangkan sikap solidaritas di antara para anggota suatu kelompok masyarakatnya.

Mengenai hakikat hidup, orang Jawa dan Cina juga sama-sama menganggap bahwa hidup itu penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan yang harus diterima oleh setiap manusia. Namun kedua-duanya optimis, bahwa kondisi ini dapat diperbaiki dengan cara aberusaha atau berikhtiar, masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Hal inilah yang kemungkinan tidak menyebabkan adanya konflik keruangan kota di Medan.

Tokoh masyarakat Cina Medan, Drs. Hapcin Lie Suheiry, M.M. memastikan, konflik antara etnik Jawa dan Cina akibat keruangan kota Medan tidak pernah terjadi. Kota Medan masih sangat kondusif dari isu-isu konflik. "Kita akui, memang Saudara-saudara kita yang pribumi itu

¹⁶ P. Hariyono (1994: 43) mengemukakan, perbedaan ini tampak pada ajaran Konfusius yang banyak berbicara tentang keluarga, serta pernyataan bahwa tiga di antara lima hubungan manusia, merupakan hubungan keluarga. Bahkan negeri Cina sendiri sering dijuluki sebagai negeri keluarga.

tidak mampu menandingi mereka (orang Cina). Paling-paling ada kecemburuan sosial antara pengusaha-pengusaha menengah ke atas itu dengan tradisional. Kita perkirakan, plaza-plaza memang dapat mematikan pasar-pasar tradisional," kata Hapcin.

Hal sama dikemukakan seorang warga Jawa yang bekerja di sekolah pembauran, tepatnya di SMA Swasta Sutomo 1 Medan. Agus Bambang Hermanto, S.S., namanya. Orang Jawa perantauan ini sudah 12 tahun mengajar di sekolah yang mayoritas siswanya orang Cina. Kepada penulis ia menuturkan, selama bekerja di sekolah tersebut, dirinya sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan sekolah ini. Meskipun saat ini ia sudah menjadi pegawai negara di Balai Bahasa Medan Depdiknas, namun pihak sekolah tidak pernah melarang atau memberhentikannya. Itu, lantaran hubungan emosional dirinya dengan pihak sekolah sudah terjalin. Tidak lain karena berlandaskan kepercayaan (*trust*).

Masalahnya, mengapa di Medan pernah terjadi konflik anti-Cina? Konflik antara pribumi – termasuk orang Jawa – dengan orang Cina ternyata merupakan warisan budaya politik adu-domba kolonial Belanda. Hal ini diakui tokoh masyarakat Cina Sie Hok Tjwan. Dalam tulisan berjudul "*Surat dari Belanda: Sejarah Keturunan Tionghoa yang Terlupakan*" dan dilansir www.indonesiamedia.com ia berpendapat, sebelum kedatangan kaum kolonialis dari Eropa, hubungan orang Tionghoa dengan orang Pribumi di wilayah Indonesia tidak menunjukkan persoalan ras. Ini diperkuat dengan peran kerja sama antara orang Cina dan Jawa dalam pengembangan syiar keagamaan. Banyak bukti bahwa miniatur dan motif sejumlah masjid di kalangan kaum Muslim Jawa berarsitektur Cina.

Kemudian datang zaman kolonial.

Untuk keperluan berkuasa, penguasa Belanda berpolitik adu-domba. Selama beberapa abad tertanam sikap anti-Cina. Sedari gerakan kemerdekaan, seharusnya sikap anti-Cina sudah dapat berangsur-angsur dihilangkan. Ini gagal disebabkan pimpinan politik pihak Pribumi maupun minoritas Cina ternyata dalam hal ini kurang tepat garisnya, ditambah adanya campur tangan Amerika Serikat dan Inggris melalui dinas rahasianya masing-masing, CIA dan MI6. Campur tangan berupa bantuan dan dorongan untuk mengobarkan perasaan anti-Cina semula dilakukan untuk membendung pengaruh komunis RRT. Hasutan terhadap orang Cina, diakuinya, juga dilakukan di Negara-negara Asean lain, namun hasilnya tak sebesar di Indonesia.¹⁷

Secara substantif, kajian terhadap masalah etnisitas memang memberikan perhatian lebih besar terhadap bentuk interaksi konflik dan dalam konteks perkotaan. Begitu besar perhatian diberikan pada potensi konflik antaretnik di perkotaan, seakan-akan hanya interaksi bersifat konflik sosial yang terjadi dan hanya berlangsung di perkotaan. Padahal, pengamatan awal penelitian ini, juga menemukan gejala interaksi kerjasama antara etnik Cina dengan Jawa di kota Medan. Bentuk kerja sama itu antara lain berupa pemilikan tanah atas nama orang pribumi, penyewaan tanah yang dikelola oleh warga setempat, serta dalam dunia usaha itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan atas pemaparan di atas, kajian berperspektif mikrointerpretatif terhadap persoalan

etnisitas, dimana kehadiran etnis Cina dan kerjasamanya dengan masyarakat perkotaan yang mayoritas etnis Jawa, khususnya dalam masalah keruangan kota, berikut didapat temuan dari hasil penelitian tentang pola kerjasama keduanya, di Kota Medan.

Orang Cina yang datang ke Tanah Deli adalah kelompok terakhir dalam gelombang migrasi dari Tiongkok. Mereka memindahkan seluruh kebudayaan mereka di tempat baru. Mereka inilah yang menjadi generasi Cina totok, dimana salah satu sifatnya memandang rendah bangsa-bangsa pribumi yang disebutnya sebagai *Ho-ana*. Sementara orang Cina yang sudah tinggal lebih dari dua generasi – disebut Cina peranakan, termasuk narasumber yang berhasil penulis wawancarai – justru lebih sulit bersosialisasi dengan sesama Cina. Apalagi, ketika ayahnya memeluk agama Islam dan meninggalkan sebagian besar budaya Cina, ia lebih sering bersosialisasi dengan orang pribumi, terutama orang Jawa.

Berdasarkan keterangan narasumber pula, persaingan antara Cina dan pribumi, bermula dari adanya diskriminasi dalam struktur sosial, ekonomi dan budaya kolonial yang pernah berlaku di Hindia Belanda. Perbedaan itu pada akhirnya menjadi dasar menguatnya kecurigaan dan prasangka yang merugikan kedua belah pihak. Tidak hanya di masa lalu, di masa kini pun kerugian-kerugian akibat kecurigaan dan prasangka itu akan terus membayangi.

Hal ini makin diperparah dengan perilaku aparat atau oknum pejabat yang lebih memberikan kemudahan kepada orang Cina untuk menanam investasi di kota Medan. Warisan budaya kolonial yang dipraktikkan sejumlah pejabat mengakibatkan orang Cina selalu dimenangkan dalam perebutan lahan publik. Tak ayal, kecemburuan sosial pun kerap terjadi. Konflik pada awal era

¹⁷ Ia menyebutkan, di negara-negara Asean selain Indonesia, kedudukan orang Cina di dalam pemerintahan tidak menjadi masalah. Di Myanmar (Burma) tokoh di belakang layar Jenderal Ne Win keturunan Tionghoa. Demikian pula di Thailand pernah memiliki perdana menteri Chuan Leekpai, di Pilipina bekas presiden Corazon Aquino dan 3 atau 4 menteri di Malaysia yang berketurunan Tionghoa.

reformasi membuktikan, amuk massa dan penjarahan tidak hanya terjadi pada orang Cina, melainkan juga pada mobil-mobil mewah plat merah atau milik negara.

Kejadian yang melibatkan Cina dan pribumi dalam satu gelanggang, terlihat jelas pada masa revolusi. Ketika orang-orang Cina yang tidak tahu harus bersikap bagaimana, harus langsung berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang bangkit karena momen untuk itu memang tepat. Di kancah revolusi di Sumatera Timur, orang Cina Medan merasa menjadi korban, meski sesungguhnya mereka menyandang dua gelar sekaligus: korban dan pelaku.

Namun, kita punya keberuntungan karena etnis yang terbesar di Medan adalah Jawa, sehingga dia (Jawa) mampu menjadi perekat antara multietnis yang ada di kota Medan ini. Kalaupun ada konflik, misalnya seperti peristiwa Mei 1998, menurut Raden Syafii, bukan karena persoalan etnis. Itu, karena persoalan kesenjangan ekonomi yang pada gilirannya melahirkan kecemburuan sosial.

"Nah, kalau kemudian etnis Tionghoa pada waktu itu yang digambarkan menjadi 'korban', namun bukan orang Tionghoanya, melainkan bidang usahanya. Karena, bukan rahasia lagi kayaknya semua bidang usaha yang strategis dikuasai etnis Tionghoa. Nah, karena isunya tadi 'kecemburuan sosial' yang diakibatkan oleh kesenjangan ekonomi, maka kalau bidang usaha yang dipegang etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa, itu 'kan suatu konsekuensi logis,' ungkap Penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pujakesuma ini.

Meski pernah ada konflik bernuansa anti-Cina pada masa-masa lampau, bagi Ketua Umum DPP Paguyuban Jawa Rembug (Pajar), itu bukan kebencian terhadap etnis Tionghoanya. Ia membuktikan, banyak orang Jawa berbelanja ke etnis Tionghoa. Begitu juga sebaliknya. Orang Cina membeli rujak

bikinan orang Jawa ketika orang Cina belum bisa bikin rujak. Begitu orang Cina sudah bisa bikin rujak, orang malah banyak membeli rujak orang Cina. Orang Indonesia buka kedai sampah, etnis lain – termasuk Cina– berbelanja. Ketika etnis Cina buka kedai sampah juga, etnis lain juga berbelanja di kedai orang Cina.

"Artinya, secara etnis tidak ada persoalan. Tapi, karena kecemburuan sosial tadi akibat kesenjangan ekonomi, maka sasarannya pasti yang memegang sentra-sentra ekonomi. Itu sesuatu yang logis. Cara mengatasi itu, bagaimana pemerataan kesempatan di bidang ekonomi," kata Raden Syafii yang akrab disapa Romo ini lagi.

Orang Cina Medan yang merasa kuat dengan dukungan orang Cina lainnya menganggap bahwa adalah keharusan untuk mempersiapkan pertahanan lebih dahulu sebelum menggunakan pertahanan itu. Pemahaman itu membuat orang Cina Medan tergolong agresif dibanding dengan Cina lainnya. Dengan ciri-ciri khusus yang disosialisasikan secara khusus pula. Gambaran tentang Cina Medan mewakili bagaimana kekuatan orang Cina itu sesungguhnya di tengah menempatkan diri dalam persaingan dengan komunitas lainnya.

Dari hasil pembahasan penelitian di atas, dapat ditarik simpulan sementara bahwa orang Jawa dan Cina sangat berperan dalam keruangan kota di Medan. Peran mereka merupakan bawaan dan tradisi sesuai dengan nilai-nilai budaya yang mereka bawa dari tanah leluhurnya. Partisipasi mereka sangat besar sehingga Medan saat ini terus berkembang meski masih perlu penataan yang lebih baik lagi.

3. Simpulan

3.1 Simpulan Faktual

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik beberapa simpulan

seperti di bawah ini.

1. Bahwa orang Jawa dan Cina sangat berperan dalam proses keruangan kota Medan sebagai wujud proses pembangunan di kota Medan. Meskipun tidak memiliki kekuatan politik di lembaga legislatif maupun eksekutif, sikap budaya orang Jawa dan Cina menjadi cerminan bagi pemerintahan setempat untuk mengembangkan dan menata ruang-ruang publik. Peran orang Jawa dan Cina dalam keruangan kota Medan ini sudah terlihat sejak mereka masuk ke Medan, terutama saat dibukanya perkebunan tembakau Deli. Usai menjadi kuli kontrak, mereka menjadi warga kota Medan dan menyemai wajah kota sekaligus. Dengan beragam karakteristiknya, mereka menghuni tiap-tiap kecamatan, mengisi berbagai bidang kehidupan baik pendidikan, ekonomi, keagamaan, pemeliharaan lingkungan hidup, keamanan, sosial, dan budaya.
2. Untuk menjalankan peran dalam keruangan kota, orang Jawa dan Cina menemukan sejumlah hambatan. Di antaranya, diskriminasi pelayanan oleh oknum aparat setempat, sikap eksklusifnya orang Cina terhadap ruang-ruang publik, dan tidak adanya saluran politik yang dapat memperjuangkan orang Jawa dan Cina dalam pengambilan kebijakan mengenai ruang publik. Lembaga-lembaga politik yang ada sebagian besar hanya menguntungkan pebisnis dan pejabat daripada kepentingan warga. Akhirnya muncullah ketidakseimbangan penguasaan lahan antara orang Jawa dan Cina pada inti kota. Jika hambatan ini tidak segera teratasi, dikhawatirkan dapat menjadi pemicu konflik yang suatu saat meledak dan merugikan semua pihak.
3. Meski terjadi ketidakseimbangan

dalam penguasaan ruang publik di Medan sebagai dampak pengembangan dan penataan kota, sampai sekarang tidak ada konflik. Konflik keruangan yang terjadi belum menjurus pada gesekan-gesekan secara fisik. Konflik hanya muncul pada adanya ketidakseimbangan pengembangan dan penataan di wilayah inti kota. Tidak sampai pada bentrok atau amuk massa. Amuk massa yang pernah terjadi pada masa terdahulu hanya merupakan akumulasi kesenjangan sosial dan bukan karena perbedaan struktur tata ruang kota yang amburadul. Ketidakadaan konflik ini terjadi karena kultur orang Jawa yang sangat menghargai daerah perantauan. Budaya *nrimo* orang Jawa menjadi penyejuk sehingga tidak gampang dipicu untuk membuat konflik. Inilah yang menjadi sumbangan terbesar orang Jawa terhadap pembangunan di kota Medan. Sebaliknya, orang Cina juga memperlakukan orang Jawa dengan wajar. Simbiosis mutualisme di antara keduanya berlangsung secara teratur dan alamiah.

4. Untuk menjalankan dan memotivasi peran warga kota dalam keruangan kota guna penataan dan pengembangan kota, Pemerintah Kota Medan menerapkan berbagai kebijakan yang mengutamakan pelayanan prima kepada warganya. Berbagai kemudahan pun dilakukan, misalnya menggratiskan pembuatan KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Selain itu, menyiapkan strategi khusus untuk mencapai Medan kota metropolitan, meliputi Ekonomi dan Lapangan Pekerjaan, Pusat-pusat Kegiatan dan koridor-koridor bisnis, Perumahan, Transportasi, Lingkungan dan Sumber Daya, Taman-taman dan Ruang-ruang Publik serta Tata Pemerintahan dan

Implementasi. Strategi itu rata-rata melibatkan partisipasi publik sesuai tuntutan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government* dan *good governance*).

3.2 Simpulan Konseptual

Berdasarkan simpulan faktual di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan konseptual seperti di bawah ini.

1. Orang Jawa harus menumbuhkan kesadaran untuk melakukan usaha-usaha seperti diperbuat orang Cina, yakni ulet dan memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga mampu bersaing dalam mengisi dan menciptakan ruang publik di Medan.
2. Pejabat pengambil keputusan jangan hanya percaya kalau yang pintar berusaha itu adalah melulu orang Cina. Orang-orang pribumi ini harus diyakini mampu melakukan usaha-usaha, sehingga kepercayaan yang diberikan itu dapat menumbuhkan kemandirian.
3. Pengaruh keruangan kota Medan terhadap kehidupan masyarakat mendapat perhatian utama dan diawasi warga kota.
4. Orang Jawa dan Cina telah sejak lama mengisi ruang-ruang publik sepanjang sejarah kota Medan.
5. Keruangan kota Medan jika tidak dikelola dengan baik bakal menimbulkan konflik karena berdampak kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Konflik keruangan sebagai hasil kecerobohan pemerintah dapat berakibat sekelompok etnik menguasai lahan dan sumber-sumber ekonomi sementara kelompok lain harus puas menjadi 'korban' ketidakseimbangan struktur tata ruang kota. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan menjadi 'api dalam sekam' yang suatu saat dapat membakar wajah kota. Untuk itu, pelayanan prima yang terus-menerus

terhadap warga kota perlu dilakukan seluruh aparat pemerintahan kota.

3.3 Saran

Berdasarkan hasil bahasan penelitian di atas, maka peneliti sedikit memberi saran, di antaranya seperti di bawah ini.

1. Mengupayakan dilakukan pengkajian lebih mendalam berkaitan dengan masalah pengembangan dan penataan kota beserta fungsinya, khususnya yang terkait dengan keruangan kota Medan.
2. Sebagai masyarakat perkotaan, orang Jawa dan Cina diharapkan tetap melestarikan tradisi dan adat istiadat yang pernah dilaksanakan masyarakat, misalnya budaya gotong royong dan tolong menolong, karena dengan adanya budaya tersebut akan tetap menjaga keseimbangan alam sehingga kota dan kebudayaannya tetap terjaga.
3. Mengupayakan dilakukan studi lebih lanjut untuk mengetahui secara lebih mendalam peranan atau partisipasi warga pendatang berkaitan dengan keruangan kota baik dari segi fisik maupun budayanya (antropologi).
4. Mengupayakan produk politik seperti kebijakan agar menampung substansi partisipasi publik.
5. Pemuka masyarakat warga Jawa dan Cina harus berusaha mentransformasi nilai-nilai budaya secara substansif dalam kehidupan sehari-hari di tengah ruang publik yang ada.
6. Mengupayakan perekonomian yang cukup agar mampu mendorong aktivitas bagi masyarakat kawasan pinggiran kota dalam mengisi keruangan kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Antropologi dan Sosiologi :

Abdullah, Taufik (ed), 1996. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta : RajaGrafindo Persada

- Adimihardja, Kusnaka, 1983. *Kerangka Studi Antropologi Sosial dalam Pembangunan*. Bandung : Tarsito
- Al-Barry, M. Dahlan Yacub, 2001. *Kamus Sosiologi Antropologi*. Surabaya : Indah
- Bowen, John R, t.t. *Religions in Practice : An Approach to the Anthropology of Religion*. Washington University in St. Louis
- Budihardjo, Eko, 1992. *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Bandung: Alumni
- dan Hardjohubojo, Sudanti, 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Alumni
- Buiskol, Dirk, 2005. *Medan, a Plantation City on the East Coast of Sumatra 1870-1942*, dalam Colombijn, Freek dkk (Ed.), 2005. *Kota Lama Kota Baru : Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. Yogyakarta : Ombak
- Colombijn, Freek, 2006. *Paco-paco (Kota) Padang : Sejarah sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta : Ombak
- dkk (Ed.), 2005. *Kota Lama Kota Baru : Sejarah Kota-kota di Indonesia*. Yogyakarta : Ombak
- Daldjoeni, N. 1992. *Seluk Beluk Masyarakat Kota : Pusparagam Sosiologi Kota dan Ekologi Sosial*. Bandung: Alumni
- Evers, Hans-Dieter, 1995. *Sosiologi Perkotaan*. Jakarta : LP3ES
- Fischer, H. TH, 1953. *Pengantar Anthropologi Kebudayaan Indonesia*. Djakarta : Pembangunan
- Hartono, Soehardi, 2005. *Medan : The Challenges in the Heritage Conservation of a Metropolis*, dalam Colombijn, Freek dkk (Ed.), 2005. *Kota Lama Kota Baru : Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. Yogyakarta : Ombak
- Herlianto, 1997. *Urbanisasi, Pembangunan, dan Kerusakan Kota*. Bandung : Alumni
- Ismuha, 1996. *Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah*, dalam Abdullah, Taufik (ed). *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Koentjaraningrat, 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta : UI Press
- , 1990. *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta : UI Press
- , 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta : UI Press
- , 2000. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- , 2002. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Koestoer, Raldy Hendro dkk, 2001. *Dimensi Keruangan Kota (Teori dan Kasus)*. Jakarta : UI Press
- Lubis, Mochtar, 1993. *Budaya, Masyarakat, dan Manusia Indonesia*. Jakarta : YOI
- , 2001. *Manusia Indonesia*. Jakarta : YOI
- Manning, Chris dan Effendi, Tadjuddin Noer, 1985. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Gramedia
- Maran, Rafael Raga, 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Menno, S dan Alwi, Mustamin, 1994. *Antropologi Perkotaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Muthahhari, Murtadha, 1990. *Masyarakat dan Sejarah*. Bandung : Mizan
- Nasikun, 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Pals, Daniel L, 2001. *Seven Theories of Religion*. Yogyakarta : Qalam
- Pelly, Usman, 1984. *Beberapa Pendekatan dan Pengalaman Studi Sejarah Sosial Perkotaan*, dalam *Pemikiran Biografi dan Kesejarahan : Suatu Kumpulan Prasaran pada Berbagai Lokakarya*. Jakarta : Depdikbud RI
- dkk, 1987. *Konflik dan Persesuaian : Bunga Rampai Perubahan Sosial dan Antropologi Pendidikan*. Jakarta : Proyek Pola Pengembangan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Kantor Menteri Negara KLH RI
- Pelzer, Karl J. 1985. *Toean Kebun dan Petani : Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. Jakarta: Sinar Harapan
- Pembangunan Berbuah Sengketa (Kumpulan Kasus-kasus Sengketa Pertanahan Sepanjang Orde Baru)*, 1998. Medan: Yayasan Sintesa dan Serikat Petani Sumatera Utara
- Pemikiran Biografi dan Kesejarahan : Suatu Kumpulan Prasaran pada Berbagai Lokakarya*, 1984. Jakarta : Depdikbud RI
- Pritchard, E.E. Evans, 1986. *Antropologi Sosial*.

- Jakarta : Bumi Aksara
- Sairin, Sjafrid dkk, 2002. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sajogjo, Pudjiwati, 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta : Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta
- Smith, Huston, 2001. *Agama-agama Manusia*. Jakarta : YOI
- Soekanto, Soerjono, 1993. *Struktur Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pers
- Suprayitno, 2001. *Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia*. Yogyakarta : Yayasan untuk Indonesia
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1997. *Migrasi, Urbanisasi, dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jakarta : UI Press
- Tjondronegoro, Sediono MP dkk (Penyunting), 1985. *Ilmu Kependudukan*. Jakarta : Erlangga
- Yunus, Hadi Sabari, 2001. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- B. Etnisitas :**
- Abdullah, Muhammad Adli, dkk, 2006. *Selama Kearifan adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laôt dan Hukôm Adat Laôt di Aceh*. Bandaaceh: Lembaga Hukôm Adat Laôt/ Panglima Laôt Aceh dan Yayasan Kehati.
- Antlov, Hans, dan Cederroth, Sven, 2001. *Kepemimpinan Jawa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Barth, Frederik, 1998. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta : UI Pers
- Coppel, Charles A., 1994. *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Diamond, Larry dan Plattner, Marc F., 1998. *Nasionalisme, Konflik Etnik, dan Demokrasi*. Bandung : ITB
- Eriksen, Thomas Hylland, t.t. *Ethnicity and Nationalism : Anthropological Perspectives*. Pluto Press
- Faruk dkk, 2000. *Perlawanan Diskriminasi Racial-Etnik*. Magelang: Indonesia Tera
- Geerts, Clifford, 1992. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta : Kanisius
- Giddens, Anthony dan Held, Davids, 1987. *Kelompok, Kekuasaan, dan Etnik*. Jakarta : Rajawali
- Habib, Achmad, 2004. *Konflik Antaretnik di Pedesaan : Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*. Yogyakarta : LKiS
- Hadiluwih, RM. H. Subanindyo, 1994. *Studi tentang Masalah Tionghoa di Indonesia (Studi Kasus : di Medan)*. Medan : Dhian Doddy
- Hae, Nur Zain dkk, 2002. *Konflik Multikultur : Panduan Meliput bagi Jurnalis*. Jakarta: LSPP
- Harahap, Basyral Hamidi dan Siahaan, Hotman M., 1987. *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak*. Jakarta : Sanggar Willem Iskander
- Hariyono, P., 1993. *Kultur Cina dan Jawa*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Herusatoto, Budiono, 1983. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta : Hanindita
- Kymlicka, Will, 2002. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta : LP3ES
- Lamry, Mohammed Saleh dkk, 1996. *Mereka yang Terpinggir (Orang Melayu di Sumatra Utara)*. Selangor, Malaysia : Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia
- Leo Suryadinata, 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa : Kasus Indonesia*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia
- (ed.), 2004. *Chinese Indonesians : State Policy, Monoculture, and Multiculture*. Singapore : Eastern Universities Press
- Mulder, Niels, 1981. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Sinar Harapan
- Pardede, Andreas dkk (Tim Penyunting), 2002. *Antara Prasangka dan Realita (Telaah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia)*. Jakarta : Pustaka Inspirasi
- Pelly, Usman, 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi : Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta : LP3ES
- , 1996. *Kedinamikan dan Perubahan Sosial di Kalangan Orang Melayu di Sumatera Utara* dalam Lamry, Mohammed Saleh dkk. *Mereka yang Terpinggir (Orang Melayu di Sumatra Utara)*. Selangor, Malaysia : Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia
- , 1999. *Social, Intitution and Ethnic Cohesion in Medan, Facets of Ethnic Relations in South East Asia*, Ed. By Miriam

- Coronel Ferrer. Manila : University of Philippines Diliman
- , 2004. *"Pri" and "Non-Pri" Student in Assimilated Schools: An Assimilation Policy in Education During the Suharto Period* dalam Suryadinata, Leo (ed.) *Chinese Indonesians : State Policy, Monoculture, and Multiculture*. Singapore : Eastern Universities Press
- Poerwanto, Hari, 2005. *Orang Cina Khek dari Singkawang*. Depok : Komunitas Bambu
- Reid, Anthony, 2005. *Asal Mula Konflik Aceh : Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*. Jakarta : YOI
- , 1979. *The Blood of the People : Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur : Oxford University Press
- Rusmini, Nani, 1996. *Dampak Perkembangan Kota terhadap Ekonomi Petani Melayu di Pinggiran Kota Medan*, dalam Lamry, Mohammed Saleh dkk. *Mereka yang Terpinggir (Orang Melayu di Sumatra Utara)*. Selangor, Malaysia : Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia
- Siahaan, Bisuk, 2005. *Batak Toba: Kehidupan di Balik Tembok Bambu*. Jakarta: Kempala Foundation
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, 2006. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945 : Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Politik*. Jakarta : YOI
- Simatupang, Maurits, 2001. *Budaya Indonesia yang Supra-etnis*. Jakarta : Papas Sinar Sinauli
- Sinar, Tengku Luckman, 2000. *Sejarah Medan Tempoe Doeloe*. Medan : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Seni Budaya Melayu
- Warnaen, Suwarsih, 2002. *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis*. Yogyakarta : Mata Bangsa
- Woodward, Mark R., 1999. *Islam Jawa*. Yogyakarta : LKiS
- Yusiu Liem, 2000. *Prasangka terhadap Etnis Cina : Sebuah Intisari*. Jakarta : Djambatan
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Danim, Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Djojosuroto, Kinayati dan Sumaryati, M.L.A., 2004. *Prinsip-prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra*. Bandung : Nuansa
- Effendi, S., 2002. *Pedoman Penyusunan Laporan Penelitian*. Jakarta : Pusat Bahasa
- Endraswara, Soewardi, 2003. *Metode Penelitian Sastra : Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama
- Faisal, Sanapiah, 1982. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional
- Glaser, Barney G and Strauss, Anselm L., 1985 *The Discovery of Grounded Theory : Strategy for Qualitative Research*. Aldin Puplicing Company, Chicago. Alih Bahasa Abd. Syukur Ibrahim dan Machrus Syamsuddin, Surabaya : Usaha Nasional
- Hidayat, Wisnu dkk, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Partisipatif*. Yogyakarta : YPAPI
- Koentjaraningrat, 1977. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia
- Marzuki, 1995. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : Hanindita
- Moleong, Lexy J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nazir, Mohamad, 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ratna, Nyoman Kutha, 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra : dari Strukturalisme hingga Poststrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Salim, Agus (Penyunting), 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Semi, M. Atar, 1993. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung : Angkasa
- Sumarto, Hetifah Sj., 2004. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta : YOI
- Suryabrata, Sumadi, 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Wibowo, Eddi dkk, 2004. *Kebijakan Publik dan*

C. Metodologi :

Budaya. Yogyakarta : YPAPI

D. Jurnal, Makalah, Surat Kabar, Majalah, Karya Ilmiah dan Lain-lain

Ampun, Nuh Anak. **Sikap WNI Keturunan Cina terhadap Pembauran di Pemkot Medan dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional.** Tesis : Universitas Indonesia, 2002

Buku Pedoman Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan Tahun Akademik 2002/2003

Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Tahun 2006-2010 Pemerintah Kota Medan

Ceritanet.situs nir-laba untuk karya tulis. Edisi 22, Rabu 12 September 2001

Damanik, Ahmad Taufan. **Sosok Kota Medan ke Depan.** Makalah : Medan, 20 Juli 2002

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. **Evaluasi Kinerja dan Program Kerja Pemkot Medan ke Depan.** Makalah : Medan, 20 Juli 2002

Dwianto, Raphaella Dewantari. **Potensi Governance dalam Kaitan dengan Perbaikan Kampung.** Jurnal : Analisa CSIS Tahun XXX/2001 Nomor 4 hal. 433

Hadiluwih, Subanindyo. **Pelurusan Sejarah Tionghoa di Sumatera Utara.** Makalah: Medan, 27 September 2003

Harian *Analisa*, Kamis 2 Juni 2005

Harian *Kompas*, Sabtu 24 Januari 2004

Harian *Kompas*, Senin 6 Mei 2002

Harian *Sumut Pos*, Jumat 3 Juni 2005

Haryoguritno, Haryono. **Filsafat Keris dalam Wawasan Seni Pedalangan.** Makalah : Medan, 2 September 1995

Hidayat, Syaiful. **Sastra Jawa Perantauan di Sumatera Utara.** Makalah : Medan, 3 Desember 2004

http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua

Informasi Perdagangan, Industri, dan Jasa Kota Medan. Medan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, 1995

Kajian Ekonomi Regional Propinsi Sumatera Utara. Medan : Kantor Bank Indonesia. Laporan Triwulan I Tahun 2002

Kesenjangan Pendidikan Penduduk Sumatera Utara 2001. Medan : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Volume 05 Nomor 020 tanggal 1 Mei 2002

Kompas.com Rabu, 03 November 2004

Lubis, H.M. Ridwan. **Meningkatkan Partisipasi Warga Kota Medan terhadap Pembangunan Menuju kepada Persaingan Global.** Makalah : Medan, 29 Juli 2002

Lubis, Suwardi. **Integrasi Sosial dan Komunikasi antar-Budaya di Kalangan Etnik Batak Toba dan Etnik Cina di Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara.** Wawasan Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 Tahun 2001 hal. 61-80

Majalah *D&R*, Edisi 980307-029/Hal. 65 Rubrik *Bisnis & Ekonomi*

Majalah *Gatra*, Edisi Khusus: 2005

Mathulada, H.A. **Kesukubangsaan dan Negara Kebangsaan di Indonesia : Prospek Budaya Politik Abad ke-21.** Jurnal Antropologi Indonesia No. 85 Tahun 1999

Oetomo, Djati, Ki H. **Sentuhan Seni Budaya Lokal dalam Pentas Seni Wayang Kulit.** Makalah : Medan, 2 September 1995

Pelly, Usman. **Marsipature Hutana Be : Sebuah Perubahan Pandangan Kosmologis Masyarakat Sumatera Utara.** Pidato Pengukuhan Guru Besar di IKIP Medan, 24 Oktober 1990

----- **Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia : Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi.** Jurnal Antropologi Indonesia No. 85 Tahun 1999

----- **Perkembangan Kota dan Manusiannya: Medan Menuju Kota Metropolitan yang Modern.** Makalah : Medan, 29 Juli 2000

Peta Kemiskinan Sumatera Utara. Medan : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2001

Poerwadarminta, W.J.S., 1984. **Kamus Umum Bahasa Indonesia.** Jakarta : Balai Pustaka

Pospos, Polin L.R. **Pointers Evaluasi Kinerja dan Program Pemerintah Kota Medan ke Depan.** Makalah : Medan, 20 Juli 2002

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2003. **Kamus Besar Bahasa Indonesia.** Jakarta : Balai Pustaka

Rangkuti. M. Ridwan. **Pemerintah Kota Medan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.** Makalah : Medan 20 Juli 2002

Simanjuntak, Bungaran Antonius. **Membangun Kota Medan dengan Prinsip Kemanusiaan**

- dan Keadilan. Makalah** : Medan, 15 Juli 2000
- Suhadi, Machi. **Hukum Jawa Kuno dan Pelaksanaannya pada Masa Majapahit. Majalah Kebudayaan** Nomor 10 Th. V 1995/1996, hal. 42-54
- Suparlan, Parsudi. **Kemajemukan, Hipotesis, Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan. Jurnal Antropologi Indonesia** No. 85 Tahun 1999
- TEMPO Interaktif**, Rabu, 09 Pebruari 2007 | 01:44 WIB
- Thung Ja Lan. **Masalah Cina : Konflik Etnis yang Tak Kunjung Selesai. Jurnal Antropologi Indonesia** No. 85 Tahun 1999
- Wahid, Solahuddin. **Masa Depan Politik Warga Tionghoa dan Pemilu 2004. Makalah** : Medan, 27 September 2003.
- Walikota Medan. **Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Medan ke Depan. Makalah** : Medan, 20 Juli 2002
- Weka, Urip Triyono. **Nuansa Etis dalam Seni Pewayangan. Majalah Kebudayaan** Nomor 9 Th. V 1995/1996
- www.ashoka.or.id. Jumat, 02 Maret 2007
- www.bppi-medan.net 28 April 2007 - 13:23 Wib
- www.indonesiamedia.com – November 1999
- www.pmb.lipi.go.id 26-05-2005 15:13 wib
- www.pemkomedan.go.id
- www.pujakesuma.org. Kamis, Thu, 2007-03-22, 9:06:43
- www.swa.co.id (**SwaOnline/Swa Majalah**)
Senin, 21 Mei 2007 - 15:36 WIB